

ABSTRAK

Pembatasan interaksi sosial menyebabkan sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk bagi Hakim dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) harus bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (Work from Home/WFH) secara bergantian. Dengan kondisi seperti itu MA harus mengeluarkan terobosan dalam bentuk Surat Edaran terutama terkait penyesuaian pola persidangan dipengadilan, terutama untuk perkara pidana yang sebelumnya persidangan dilakukan secara klasikal atau tatap muka harus dilakukan secara online jarak jauh atau teleconference.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1) urgensi pembentukan dasar hukum proses peradilan pidana dalam kondisi pandemi covid-19, (2) efektifitas terhadap proses peradilan pidana secara virtual dalam kondisi pandemi covid-19 terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Blora, hambatan, dan (3) solusi yang muncul dalam pelaksanaan proses peradilan pidana secara virtual di masa pandemi covid-19 pada Pengadilan Negeri Blora.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Urgentitas SE MA No 1 Tahun 2020 antara lain memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik dan memungkinkan dilakukannya sidang jarak jauh dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Dengan demikian, persidangan secara elektronik juga penting untuk mencegah penularan Covid-19 karena para pihak yang terlibat dalam persidangan tidak bertemu secara langsung, (2) Situasi efektivitas proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Blora bahwasanya pelaksanaan persidangan melalui teleconference di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference. (3) Hambatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Blora berupa hambatan substantif dan hambatan teknis. Untuk mengatasi kendala substansif, persidangan secara elektronik perlu diatur dengan baik dalam suatu Undang-Undang, Sedangkan untuk mengatasi kendala teknis, perlu menyediakan Sumber Daya Manusia IT dengan jumlah yang memadai, meningkatkan pemahaman IT aparat penegak hukum, dan menyediakan sarana-prasarana pendukung termasuk ketersediaan jaringan internet.

Kata Kunci : Efektivitas, Peradilan Pidana Virtual, Pandemi Covid-19.

ABSTRACT

Restrictions on social interaction cause most of the State Civil Apparatus (ASN) including Judges and Judicial Apparatus at the Supreme Court of the Republic of Indonesia (MA) to work or carry out official duties from home (Work from Home/WFH) alternately. Under such conditions, the Supreme Court must issue a breakthrough in the form of a Circular, especially regarding adjustments to the trial pattern in court, especially for criminal cases where trials were previously conducted classically or face-to-face and had to be conducted online remotely or by teleconference.

This study aims to determine, examine and analyze: (1) the urgency of establishing the legal basis for the criminal justice process in the covid-19 pandemic, (2) the effectiveness of the virtual criminal justice process in the covid-19 pandemic condition on the operation of the criminal justice system in the courts. Blora District, obstacles, and (3) solutions that emerged in the virtual implementation of the criminal justice process during the covid-19 pandemic at the Blora District Court.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) The urgency of SE MA No. 1 of 2020 includes cutting physical interactions in public services and enabling remote hearings using information technology facilities. Thus, the electronic trial is also important to prevent the transmission of Covid-19 because the parties involved in the trial do not meet in person, (2) The situation of the effectiveness of the criminal justice process at the Blora District Court that the implementation of the trial via teleconference in the future will cause harmonization problems law. With the amendment of Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (referred to as the Criminal Procedure Code) which regulates the Criminal Justice System in Indonesia, it is difficult to hold trials through Teleconference. (3) The obstacles that occur in the Blora District Court are in the form of substantive obstacles and technical obstacles. In order to overcome substantive obstacles, electronic trials need to be properly regulated in a law. Meanwhile, to overcome technical obstacles, it is necessary to provide adequate number of IT Human Resources, improve IT understanding of law enforcement officials, and provide supporting infrastructure including the availability of Internet Network.

Keywords: Effectiveness, Virtual Criminal Justice, Covid-19 Pandemic.